

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru sejak dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada tahun 1969 merupakan pembangunan yang mencakup seluruh bidang kehidupan Bangsa Indonesia secara menyeluruh, berencana, bertahap, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus menerus.<sup>1</sup> Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Segala hal perlu dilakukan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan yang dimaksud. Namun, upaya-upaya tersebut dipastikan akan memerlukan daya dan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Kiranya dibutuhkan suatu sistem yang terarah agar dana-dana yang dimiliki oleh negara mampu dipergunakan untuk seefisien mungkin dan tepat guna. Sangat dimungkinkan jika dana-dana yang dimiliki negara tersebut terbuka untuk dilakukan penyelewengan-penyelewengan, kebocoran dan penyalahgunaan kekuasaan serta jenis-jenis perbuatan manipulatif lainnya.

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso,dkk, 1986, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi th 1971*, Jakarta: Bina Aksara, hal.20

Salah satu jenis tindakan penyelewengan yang marak terjadi yaitu korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap negara.<sup>2</sup> Kata korupsi mengandung makna yang harus berlawanan dengan hal yang positif. Korupsi merupakan sebuah penyakit yang mempunyai tujuan untuk merusak kehidupan ekonomi dan landasan moral tata kehidupan manusia. Sebuah pemerintahan yang terlanda wabah korupsi yang menyerang segenap sistem akan mengabaikan sebuah tuntutan pemerintahan yang layak.<sup>3</sup>

Korupsi sudah ada di tengah-tengah kita sejak manusia membentuk organisasi.<sup>4</sup> Tak luput pula Negara Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1945.<sup>5</sup> Adanya korupsi dikarenakan perilaku kejahatan yang memangku jabatan penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan.<sup>6</sup> Motifnya adalah sebuah keinginan untuk memiliki keuntungan atau pendapatan lebih.

Birokrasi pemerintah yang prosedural dan dilaksanakan dengan proses yang panjang, memungkinkan benih-benih upaya pengkayaan diri pribadi muncul. Situasi yang menuntut banyak orang berkembang dengan cepat,

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>3</sup> Alatas, 1987, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LPIS, hal. 178

<sup>4</sup> Robert Klitgaard, 2002, *Penentuan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 9

<sup>5</sup> Dengan adanya Peraturan Penguasa Militer No. PRP/P.M/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan untuk kemudian dilengkapi dari tahun ke tahun, berlanjut ke Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRP/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda membuktikan Indonesia terserang korupsi sejak masa itu. Lihat Hari Sasangka, 2007, *Komentar Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hal. 6-7

<sup>6</sup> Bambang Purnomo, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: PT Bina Aksara, hal. 12

tidak sebanding dan dibarengi dengan pembaharuan prosedur pelayanan umum. Petugas yang berwenang lebih menekankan pada formalitas-formalitas yang berbelit, sehingga banyak pihak menawarkan kemudahan dengan imbalan biaya.

Makin meluasnya perbuatan korupsi dapat menumbuhkan situasi sikap hidup untuk mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, pelaksanaan segala peraturan yang menyangkut kepentingan orang banyak dipersulit untuk maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, anggota masyarakat melakukan persaingan kedudukan atau perlombaan secara tidak wajar dan semua persaingan tidak sehat dari segala lapisan masyarakat sebagai penjelmaan perbuatan korupsi yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan Negara dan tumbuh dalam segala lapisan masyarakat. Kesemuanya mampu membentuk suatu pola pikir dan bertindak. Hal itu menyebabkan korupsi menjadi suatu budaya.<sup>7</sup>

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan (*crimal policy*). Kejahatan merupakan salah satu cara dalam penanggulangan kejahatan korupsi agar tidak semakin membudaya. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan sarana penal (dengan sanksi) dan sarana non penal (tanpa menggunakan sanksi). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa; (3) takut

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 16

karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>8</sup>

Sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi diwujudkan dengan lahirnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah korupsi yaitu peraturan perundang-undangan No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi yang lain sangat sulit untuk dilakukan, meskipun telah diupayakan suatu prioritas terhadap penanganan perkara jenis ini. Dikemukakan dalam kongres PBB VII mengenai *Tahune Prevention of Crime and Treatment of Offders tahun 1980*, bahwa aparat penegak hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi jenis tindak pidana ini. Ini dikarenakan dua hal, yakni:<sup>9</sup>

- a) Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari pelaku (*tahune high economic or political status of tahune perpetrators*)
- b) Keadaan disekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan (*and tahune circum tence under which tahune had been commited were such as to decrease tahune likelihoodof tahuneir being report prosecuted*).

Begitu kronisnya tindakan korupsi serta perkembangan tindak pidananya di Indonesia, pada tahun 2003 lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang untuk menangani perkara korupsi yang kewenangannya melebihi wewenang yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan kepada Lembaga Penegak Hukum lain. Namun, agar

---

<sup>8</sup> Soenarso Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 42

<sup>9</sup> Sudrajat Mukti Nugroho , 2003, *Study Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, hal.5

tidak terjadi ketumpangtindihan kewenangan antara KPK dengan POLRI serta Kejaksaan, maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang KPK dengan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>10</sup>

Pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri, KPK mulai beraktifitas, walaupun belum lengkap perangkat hukumnya, di tahun 2004 secara tebang pilih sudah melakukan penyidikan dan penuntutan.<sup>11</sup> Setelah Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono terpilih, di samping keberadaan KPK, dibentuk Timtas Tipikor di bawah Jaksa Agung dengan tujuan untuk menuntaskan perkara-perkara dugaan korupsi yang belum selesai yang ditangani oleh kejaksaan dan perkara-perkara korupsi lainnya yang merupakan hasil penyidikan kejaksaan.<sup>12</sup>

Pada tahun 2008 KPK menggebrak dunia hukum Indonesia dengan penyidikan dan disertai penangkapan terhadap oknum Kejaksaan Agung, anggota DPR-RI dan pejabat-pejabat Bank Indonesia.<sup>13</sup> Pada waktu itu KPK melakukan penggeledahan terhadap beberapa ruangan di gedung DPR-RI yang semula menuai penolakan dan ketidaksetujuan dari para pihak penghuni gedung itu. Walaupun demikian penggeledahan tetap

---

<sup>10</sup> Penjelasan Bab Umum UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa . . . pengaturan kewenangan KPK dalam UU ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut (kejaksaan, POLRI dan instansi hukum lain yang menangani perkara korupsi)

<sup>11</sup> Istilah tebang pilih lahir disebabkan karena penyidik dalam melakukan rangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dalam suatu perkara korupsi didasarkan pada hak diskresi yang disalahgunakan. Mereka memiliki kewenangan terhadap siapa-siapa saja yang dipilih untuk dijerat. Lihat O.C Kaligis, 2008, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi jilid I*, Bandung: PT.Alumni, hal. 23

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 8

dilakukan sebagai wujud tak berkepihakan KPK dan keterbukaan wakil rakyat atas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tak hanya DPR-RI, Bank Indonesia, serta Korps Adhyaksa, KPK juga melakukan penggeledahan ruangan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan untuk kasus gratifikasi Harini Wijoso, pengacara dari Probosutedjo. Sepak terjang KPK dibuat seluas itu demi kelancaran dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.<sup>14</sup>

Lalu bagaimana peran Lembaga Hukum yang selama ini menangani perkara korupsi setelah lahirnya KPK?

KPK lahir karena POLRI selama ini dinilai sebagai sebuah lembaga penegakan hukum yang kurang tegas dalam menindak perkara korupsi. Tidak berbeda dengan POLRI, citra Kejaksaan dianggap melorot dalam prestasi pemberantasan korupsi.<sup>15</sup> Belum lagi masyarakat luas dipertontonkan dengan adanya korupsi yang juga merasuk dalam sistem hukum di Indonesia, buktinya seorang penegak hukum yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya sebuah keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan, dan disaat itulah muncul kegagalan dalam menegakkan keadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 12

<sup>15</sup> Azis Syamsudin, "Penegakan Hukum Tanpa Kesejahteraan", *Requisitoir*, Volume 8, (Februari 2011), hal. 45

<sup>16</sup> Buktinya banyak laporan masyarakat yang mengungkapkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti dalam (1) kasus hakim Herman Allositandi dan panitera Andri Djemi yang diduga melakukan pemerasan terhadap saksi Walter Sigalingging dalam kasus korupsi jam sostek; (2) kasus jaksa Cecep Sunarto dan Burdju Roni yang terindikasi menerima suap dari terdakwa Achmad Junaedi dalam kasus korupsi jaminan sosial tenaga kerja; (3) kasus penyidik KPK AKP Suparman yang terindikasi menerima suap dari saksi dalam kasus korupsi PT. Industri Sandang Nusantara, *Op. Cit.*, hal. 17-18

Hukum tampak begitu rapuh dan sulit ditegakkan saat berhadapan dengan penguasa, pemilik uang atau pemodal kuat. Bahkan hukum kadang dijadikan alat kepentingan politik kekuasaan. Hukum rapuh, karena bukan hukum itu sendiri, melainkan karena hukum memang didesain untuk jadi alat kekuasaan dari berbagai lini dan dari konfederasi kekuasaan yang ada.<sup>17</sup>

KPK dibentuk dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh sistem utama yaitu POLRI dan Kejaksaan belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan.

Realitanya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan penyelidikan terhadap perkara korupsi sedikit banyak terhalang oleh kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian maupun penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>18</sup>

Dalam sistem acara pidana di Indonesia kedudukan penyidik hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pegawai negeri sipil yang kewenangannya diberikan secara khusus oleh Undang-Undang.<sup>19</sup>

Sementara itu kedudukan penuntutan dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Hukum merupakan alat kepentingan politik kekuasaan, jelas terlihat dalam perkara Gayus HP Tambunan, adanya pernyataan Satgas Mafia Hukum atas keterlibatan Ketua Umum Golkar (Aburizal B) dalam mafia pajak, berbalik mengumbar kebusukan Ketua Umum Demokrat (Soesilo BY) keterlibatannya dalam kasus Century. Mas Achmad Santosa, "Hukum Digilas Demi 2014?", *Konstan*, Volume V, (2 Februari 2011), hal 24

<sup>18</sup> Dalam perkara Gayus Tambunan POLRI "menolak" menyerahkan perkara tersebut dengan alasan "masih sanggup" padahal dalam Pasal 6 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa, KPK dapat mengambil alih penyelidikan dan penyidikan suatu perkara yang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, dan kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan berkas perkara paling lambat 14 hari.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Akan tetapi kedudukan penyidik dalam penanganan perkara korupsi muncul satu lembaga hukum lagi yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan timbulnya ketumpangtindihan kewenangan antara POLRI, Kejaksaan, dan KPK dalam penanganan perkara korupsi.

Setelah dibentuknya Komisi ini tak serta merta pula menjadikan korupsi hilang seketika dari sendi-sendi kehidupan negeri ini. Sejak dibentuknya KPK, eksistensi komisi ini malah terlihat muncul tenggelam ketika menangani suatu perkara korupsi. Menurut ketentuannya Komisi Pemberantasan Korupsi berhak menangani suatu perkara korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap negara paling sedikit satu milyar.<sup>21</sup> Syarat lain bahwa perkara tersebut haruslah melibatkan seorang penyelenggara Negara.<sup>22</sup> Yang terakhir perkara tersebut mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.<sup>23</sup>

Delapan tahun keberadaan KPK ditanggapi pro dan kontra oleh beberapa pihak. Namun sejatinya masyarakat menaruh harapan besar terhadap lembaga ini agar mampu mengusut perkara korupsi secara tuntas. Seberapa jauh pengaruh lembaga ini terhadap iklim tindak pidana korupsi di Indonesia?

---

<sup>21</sup>Lihat Pasal 11 huruf c UU No 31 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>22</sup>*Ibid*, Pasal 11 huruf a

<sup>23</sup>*Ibid*, Pasal 11 huruf b



Untuk diketahui pada tahun 2003 di temukan penyimpangan keuangan negara oleh BPK senilai 50 persen dari dana APBN pada waktu itu.<sup>24</sup> Laporan lain menyatakan dalam Transparansi Internasional sebagaimana diungkapkan dalam siaran persnya pada tanggal 20 oktober 2004, bahwa dari 146 negara yang disurvei, Indonesia masuk dalam urutan kelima negara terkorup di dunia.<sup>25</sup> Kwik Kian Gie juga pernah memberikan gambaran betapa besar kekayaan Negara yang di korup (per tahun) yang disebutkan melebihi APBN.<sup>26</sup>

Inilah bukti Kejahatan korupsi di Indonesia sedang membudaya, terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang diungkap BPK dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara.

Berhasilnya suatu penegakan hukum tidak hanya mampu dilihat dari segi berhasil tidaknya suatu penanggulangan terhadap perkara tersebut. Tetapi lebih mendasar kepada sudah pantaskah suatu putusan pidana yang dikenakan terhadap koruptor tersebut.<sup>27</sup>

Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya tindak pidana korupsi, sebagai perwujudan penegakan hukum dengan sarana penal. Namun, dalam kenyatannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin berkembang pula

---

<sup>24</sup> O.C Kaligis, *Loc.Cit.* hal. 23

<sup>25</sup> Kompas, *Penyelewengan Uang Negara Makin mencemaskan*, 2 oktober 2004, (<http://kompas.com/kompas-cetak/0410/02/fokus/1296934.htm>), diunduh rabu 09, maret 2011

<sup>26</sup> Menurut Kwik Kian Gie, “ikan, pasir, dan kayu yang dicuri senilai 90 Triliun rupiah. Pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak tetapi tidak masuk ke kas Negara senilai 240 triliun rupiah. Subsidi kepada perbankan yang tidak akan pernah sehat senilai 460 triliun rupiah. Kebocoran dalam APBN 20% dari 370 triliun rupiah yaitu 74 triliun rupiah, dengan demikian kurang lebih 444 triliun lebih besar dibanding APBN pada tahun 2003. Kompas. *Fokus memerangi korupsi hanya dengan satu kata: LAWAN*, 25 oktober 2003, (<http://kompas.com/kompas-cetak/0310/25/fokus/1296112.htm>), diunduh rabu 09, maret 2011

<sup>27</sup> Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: kompas, hal. 146

tipe atau jalan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Banyak pihak yang berusaha mencari celah demi melancarkan tindakan korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, serta menganalisis mampukah Lembaga Hukum yang ada seperti POLRI dan Kejaksaan untuk berjalan secara beriringan demi tercapainya sebuah Negara yang bebas dan bersih dari korupsi, dengan judul: PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PENUNTUT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

### 1. Pembatasan Masalah

Untuk memberi batasan agar penelitian ini tetap fokus pada pokok permasalahan yang dikaji, serta untuk mengantisipasi masuknya hukum yang tidak berkaitan, maka penulis melakukan pembatasan pada peran KPK secara normatif berdasar UU No 30 tahun 2002 kedudukannya sebagai penuntut dalam penegakan tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber-sumber yang didapat penulis bukanlah dari hasil wawancara atau penelitian lapangan melainkan berasal dari analisis data tertulis mengenai KPK, POLRI (UU No 22 tahun 2002), dan Kejaksaan (UU No 16 tahun 2004).

## 2. Perumusan Masalah

- a) Bagaimanakah perbedaan dan persamaan peran normatif KPK dengan POLRI dan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b) Faktor-faktor normatif apakah yang mempengaruhi peranan KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi?
- c) Seberapa jauh KPK dapat melaksanakan perannya dilihat berdasar jumlah perkara yang dihadapi?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian:

- a) Menggambarkan kewenangan KPK menurut UU No 30 tahun 2002 dengan lembaga hukum lain dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung secara normatif lembaga KPK selama menjalankan kewenangannya.
- c) Menilai keberhasilan lembaga KPK tersebut dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diungkap dan diselesaikan selama lahirnya lembaga tersebut.

### 2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, besar harapan bagi penulis bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi masyarakat dan kaum akademisi sendiri. Manfaat penelitian tersebut berupa:

- a) Bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum
- b) Penelitian ini dapat menambah kepustakaan pada fakultas hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta
- c) Bahwa hasil penulisan ini bermanfaat untuk digunakan sebagai referensi di bidang hukum pidana.
- d) Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum pidana terutama dalam hal penuntutan

#### D. Kerangka Pemikiran

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>28</sup> Adanya sanksi pidana diakui sebagai sebuah upaya penanggulangan terhadap suatu kejahatan.

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan disertai ancaman sanksi bagi para pihak yang secara sengaja atau tidak, melanggar ketentuan yang berlaku. Tindakan pemerintah yang menjadikan korupsi sebagai sebuah tindak pidana tidak serta merta membuat pelaku jera, atau bahkan para pelaku berusaha untuk mencari cara lain demi melancarkan perbuatan korupnya.

---

<sup>28</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 112

KPK lahir sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun baru dibentuk pada tahun 2003 sebagai wujud pelaksanaan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan baru memiliki 125 personel ketika awal dibentuk, secara pasti KPK sudah melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi.<sup>29</sup>

KPK merupakan sebuah lembaga supervisi yang memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding lembaga hukum lain. Tindakan supervisi tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 30 tahun 2002 yakni,

*“Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.”*

Dengan pemberian kebebasan dan merupakan lembaga yang independen dari kekuasaan manapun, menjadikan KPK merasa “lebih leluasa” dalam bergerak, tanpa intimidasi dari atasan, KPK mampu menjerat penyelenggara-penyelenggara Negara tinggi setingkat gubernur dan bupati.<sup>30</sup>

Jalan KPK sendiri tidaklah mulus, bukan tanpa godaan suap dan iming-iming lainnya, KPK (khususnya ketua KPK Antahunasari A) pernah terjerat perkara pembunuhan seorang pengusaha. Banyak masyarakat menilai hal tersebut hanyalah akal-akalan dari segelintir orang yang tidak

<sup>29</sup>Dalam laporan akhir tahun 2004, KPK menyatakan memiliki 125 karyawan tetap dan 55 karyawan honorer, Laporan KPK tahun 2004, (desember 2004), dalam [WWW.KPK.go.id](http://WWW.KPK.go.id), diunduh 2 mei 2011

<sup>30</sup>KPK telah berhasil menyeret Gubernur NAD (Ir. Abdullah Puteh, M. Si) dalam perkara pengadaan helikopter MI-2 meskipun sempat terjadi perdebatan antara hakim TIPIKOR mengenai kewenangan KPK sebagai penyidik dalam perkara tersebut. Permasalahannya adalah mengenai *tempus delicti* perkara tersebut yang terjadi sebelum KPK terbentuk (perkara terjadi tahun 2001 sedangkan KPK dibentuk berdasar UU No 30 tahun 2002), O.C Kaligis, *Op.Cit*, hal.126

berkenan dengan sepak terjang KPK selama ini. Meskipun dalam proses peradilan menghasilkan putusan bahwa ia terbukti bersalah.

Tidak hanya itu, masih teringat dalam benak kita dua pimpinan KPK Bibit dan Chandra terjerat perkara suap. Namun, masih tetap saja masyarakat membela dengan alasan, itu hanyalah trik pihak yang ingin menjatuhkan KPK.

Terlihat begitu besar antusias masyarakat dengan adanya KPK. Masyarakat sudah sangat lelah dengan segala jenis tindakan korup yang dilakukan dinegeri ini, tetapi tidak ada yang mampu menghentikan atau bahkan menjerat pelakunya dengan pidana.

Korupsi bukanlah suatu tindak pidana yang bisa dilakukan hanya oleh satu dua orang, tetapi tindakan ini merupakan tindakan korporasi. Adanya sebuah sistem pengawasan menjadikan seorang penyuap tidak hanya menyuap satu pihak, melainkan beberapa pihak yang berada dalam deret sistem pengawasan. Jadi agak janggal jika sebuah perkara korupsi terungkap, hanya satu pihak yang dijadikan tersangka.

Meskipun begitu, nyata-nyatanya kehadiran KPK mendapat tanggapan baik oleh Negara lain. Jika selama ini upaya pemerintah dalam penanggulangan korupsi dinilai setengah-setengah, setelah hadirnya KPK merupakan nilai tambah bagi Indonesia terhadap penanganan korupsi dimata dunia.

Permasalahan KPK yang lain timbul dalam hubungan penanganan perkara dengan lembaga hukum lain seperti POLRI dan Kejaksaan. Masing-masing lembaga masih terlihat terlalu konvensional dalam

mengartikan maksud dan tujuan dalam Pasal 11 dan Pasal 6 Undang-Undang KPK. Berdasar Pasal 6 UU No 30 tahun 2002 , KPK memiliki tugas:

*“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:*

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
- d. Melakukan tindakanm-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan*
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan Negara.”*

Dalam huruf b diperjelas dalam pasal berikutnya, yakni Pasal 8 yang menyatakan bahwa:

- 1. “Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dalam instansi yang melakukan pelayanan publik;*
- 2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan;*
- 3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja , terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- 4. Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.”*

Selain itu menurut penulis, KPK dianggap sebagai komisi pemberantas korupsi bermuka dua. Di satu sisi mereka menindak koruptor, di sisi lain

mereka merupakan mantan orang-orang yang pernah berada dalam siklus korupsi (meskipun tidak dapat dipastikan mereka pernah atau tidak melakukan korupsi). Alasannya penyidik KPK adalah mantan Jaksa, dan penyelidik KPK merupakan mantan anggota POLRI yang keseluruhannya merupakan orang-orang non-karir. Lebih parahnya lagi Ketua KPK merupakan orang yang dicalonkan oleh Presiden dan dipilih oleh anggota DPR-RI, yakni orang-orang yang kelak mungkin akan dijatuhkan oleh KPK.<sup>31</sup>

Keraguan publik diwakili oleh pernyataan dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*), yang menganggap KPK mulai turun prestasinya dua tahun terakhir ini.<sup>32</sup> Entah karena kekurangan SDM atau melemahnya kekuatan KPK karena banyak pihak penguasa yang mulai merongrong stabilitas KPK, namun pada intinya ICW tetap berpendapat KPK mulai melemah menangani koruptor.

Ketidakstabilan tersebut harus dilihat secara cermat baru kemudian diketahui penyebabnya. Dengan demikian, setelah tugas dan wewenang normatif KPK selesai dianalisis maka akan diketahui unsur-unsur pembatas kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan POLRI. Setelah itu akan didapat jawaban secara jelas masalah utama tidak akurnya hubungan antara lembaga hukum tersebut.

Lebih jauh, implementasi kendala yang mungkin ditemui selama KPK menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menindak perkara korupsi

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 30 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

<sup>32</sup> Kompas, *Loc.Cit*



akan terungkap secara pasti. Kendala-kendala yang dimungkinkan timbul akan dikaji agar diketemukan solusi yang terbaik.

Penelitian selanjutnya adalah bermuara pada analisis peran KPK terhadap penanganan korupsi sehingga kita akan mampu melihat sejauh mana kontribusi KPK terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan untuk memonitoring perkembangan kasus-kasus oleh KPK.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan tentang peran KPK yang delapan tahun ini jatuh bangun memerangi korupsi. Korupsi tidak hanya diperangi dan mampu hilang hanya dengan pengenaan sanksi terhadap koruptor, tetapi sanksi non penal berupa kesadaran masyarakat adalah penindakan yang paling efektif.

#### E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh suatu data dengan lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan data penelitian dapat tercapai. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dihadapi.<sup>33</sup> Suatu metode penelitian

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia press, hal. 6

mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>34</sup>

a) Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian yang menggambarkan atau menguraikan tumpang tindihnya kewenangan antara KPK dengan POLRI, dan Kejaksaan serta untuk memahami seberapa besar pengaruh keberadaan lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai berdasar jumlah perkara yang ditangani KPK, dari bahan sekunder atau data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b) Metode pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>35</sup>

c) Jenis data

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tulisan lainnya baik dalam format elektronik maupun non elektronik.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Noeng Muhadjir, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, hal.3  
<sup>35</sup> Soerjono, *Op Cit*

1. Bahan hukum primer
  - i. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi
  - ii. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai tugas dan wewenang POLRI, Kejaksaan dan KPK
  - iii. Yurisprudensi yang berkaitan dengan penanganan korupsi
2. Bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari
  - i. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah korupsi
  - ii. Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHP
  - iii. Hasil karya ilmiah yang menyangkut tentang POLRI, Kejaksaan serta KPK dan penanganannya dalam tindak pidana korupsi

d) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau bahan pustaka. Studi pustaka atau bahan pustaka ini merupakan metode yang meliputi pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, memahami dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian, yakni mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia yang telah diatur dengan masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Teknik analisis data

Untuk kesinambungan dalam pengerjaan data, digunakan analisis interaktif. Ada tiga komponen analisis yaitu:<sup>36</sup> reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitas ketiga komponen dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Peneliti hanya bergerak di antara ketiga komponen analisis tersebut, sesudah pengumpulan data selesai pada setiap unitnya, agar dapat dilihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian dari penelitian maka dibuat sajian data yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang disusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diajukan sebagai acuan penarikan kesimpulan dan refleksi.

F. Sistematika Skripsi

Dalam skripsi ini hasil penelitian akan dipaparkan dalam empat bab, di mana masing-masing Bab terdiri atas beberapa sub bab yang memiliki hubungan secara sistematis demi kejelasan dan kemudahan pemahaman. Sistematika masing-masing bab secara garis besar berisi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Berisi mengenai alasan-alasan penulis memilih topik dan menentukan judul penelitian. Pemaparan dasar penulisan diperoleh dari literatur, majalah, koran, *website*, makalah dan lainnya. Pada

---

<sup>36</sup> Matahunew B Miles dan A Michel Huberman, 1922, *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, 1922, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, hal 20

Bab ini dirumuskan pula masalah yang menjadi pokok penelitian berupa komparasi kewenangan normatif antara KPK, POLRI dan Kejaksaan, peranan KPK serta kontribusi KPK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Bab II tinjauan pustaka, berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai referensi penulis sekaligus merupakan landasan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam Bab pertama. Kajian-kajian teoritis tersebut selain berasal dari bahan pustaka, juga penulis peroleh dari hasil penelitian seseorang, hasil seminar, loka karya, artikel jurnal ilmiah baik cetak maupun elektronik. Tinjauan pustaka dalam Bab dua ini menjelaskan pokok-pokok mengenai KPK, pengertian tindak pidana baik pidana umum maupun pidana korupsi, dan tinjauan umum mengenai proses pidana oleh penyidik, penyidik hingga penuntutan oleh masing-masing lembaga berwenang sehingga dapat dilihat peran KPK dalam proses pemidanaan perkara korupsi.

Bab III pembahasan, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji dan diolah berdasar data-data yang diperoleh dalam Bab dua. Setiap masalah dianalisis secara memadai dengan pedoman pada tinjauan pustaka dan untuk setiap masalah akan dijadikan subbab tersendiri, sehingga diperoleh hasil pembahasan atau analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulisan perumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan secara sistematis mengenai komparasi lembaga hukum yang menangani perkara korupsi hingga pada implementasi KPK berdasar

jumlah perkara yang dihadapi, diharapkan mampu memudahkan dalam memahami tujuan penelitian.

Bab IV kesimpulan, berisi kesimpulan yang merupakan klimaks dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan pada Bab tiga. Bab ini merupakan kristalisasi pembahasan yang disimpulkan secara sistematis dari kesimpulan-kesimpulan sementara sebelumnya mengenai kontribusi atau peran KPK dalam menjalankan fungsinya.